

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Paradiplomasi yang dijalin oleh Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988 dalam bentuk kerja sama *sister city* ini dinilai memiliki pola yang menarik karena tidak sejalan dengan ketentuan dibentuknya kerja sama *sister city* yaitu atas dasar kesamaan potensi unggulan daerah. Hal ini dibuktikan dari banyaknya perbedaan latar belakang antara Kota Padang dan Kota Hildesheim. Walaupun demikian, aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini dapat berkembang dari tahun 1988-2022 dan masih aktif hingga saat ini. Berkembangnya aktivitas paradiplomasi Padang-Hildesheim selama 34 tahun tersebut tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat diidentifikasi berdasarkan konsep paradiplomasi oleh Alexander S. Kuznetsov. Kuznetsov menjelaskan bahwa secara garis besar, dalam menjelaskan penyebab berkembangnya suatu aktivitas paradiplomasi dapat diidentifikasi berdasarkan 2 faktor, yaitu berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal.<sup>201</sup>

Faktor eksternal Kota Padang yang ditemukan sebagai penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah sebagai berikut. Pertama, globalisasi. Berkembangnya fenomena globalisasi mendorong fokus negara terhadap isu-isu politik rendah sehingga menciptakan kesepakatan SDGs. Dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim, Pemerintah Kota Padang yang berperan sebagai pemerintah

---

<sup>201</sup> Alexander S. Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*, (New York: Routledge, 2015), 102.

subnasional Indonesia ikut mengambil peran untuk mencapai SDGs. Kedua, demokratisasi. Perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi di Indonesia menjadikan jelasnya aturan mengenai paradiplomasi sehingga Pemerintah Kota Padang dapat memperluas bidang kerja samanya dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim sesuai dengan hukum di Indonesia. Ketiga, domestikasi kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri Indonesia untuk mencapai SDGs juga diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang sehingga mendorong terbentuknya berbagai program sebagai implementasi SDGs dalam paradiplomasi ini.

Selanjutnya faktor internal Kota Padang yang ditemukan sebagai penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah sebagai berikut. Pertama, desentralisasi. Adanya pemberian otoritas kepada pemerintah daerah di Indonesia untuk melakukan hubungan luar dapat dilihat dari Pasal 367 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kedua, masalah dengan proses pembangunan bangsa. Adanya permasalahan kualitas air sungai di Indonesia membuat pemerintah subnasional juga harus ikut dalam penanganan masalah kualitas air sungai. Ketiga, asimetri unit penyusun. Adanya potensi unggulan di wisata bangunan bersejarah Kota Padang diharapkan dapat mencapai kepentingan nasional di bidang sosial budaya untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia ke dunia internasional. Keempat, stimulus luar. Melalui kontak yang baik antara Mimi dan Roland dengan administrasi, universitas, dan banyak orang di kedua kota ini menjembatani pembentukan dan pelaksanaan paradiplomasi Padang-Hildesheim selama 34 tahun ini. Adanya dukungan dari mantan pemimpin daerah Kota Padang dan pihak UBH juga menyebabkan berkembangnya paradiplomasi ini. Kelima, peran pemimpin

daerah. Adanya komitmen penuh pemimpin daerah di Kota Padang menyebabkan paradiplomasi Padang-Hildesheim ini dapat berkembang hingga tahun 2022.

Selanjutnya, dilihat dari perspektif Kota Hildesheim, faktor eksternal penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah sebagai berikut. Pertama, globalisasi. Berkembangnya fenomena globalisasi mendorong fokus negara terhadap isu-isu politik rendah sehingga menciptakan kesepakatan SDGs. Dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim, Pemerintah Kota Hildesheim yang berperan sebagai pemerintah subnasional Jerman ikut mengambil peran untuk mencapai SDGs. Kedua, domestikasi kebijakan luar negeri. Adanya kebijakan luar negeri Jerman dalam memberikan bantuan pembangunan dan bantuan di bidang pendidikan juga diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Hildesheim dalam aktivitas paradiplomasi Padang-Hildesheim.

Faktor internal Kota Hildesheim yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah sebagai berikut. Pertama, federalisasi. Dalam konstitusi dasar Jerman, pemerintah Jerman telah menjelaskan terkait wewenang pemerintah negara bagian untuk dapat terlibat dalam kerja sama luar negeri seperti kerja sama *sister city* secara jelas dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman. Kedua, asimetri unit penyusun. Potensi unggulan budaya yang dimiliki Kota Hildesheim sebagai kota warisan budaya yang diakui UNESCO dengan wisata bangunan bersejarahnya mendorong Pemerintah Kota Hildesheim untuk selalu memaksimalkan potensi tersebut ke arena internasional. Potensi unggulan Kota Hildesheim yang maju dalam bidang teknologi dan industri juga menjadikan

Pemerintah Kota Padang tertarik untuk mempertahankan kerja sama *sister city* dengan Kota Hildesheim. Ketiga, stimulus luar. Melalui kontak yang baik antara Mimi dan Roland dengan administrasi, universitas, dan banyak orang di kedua kota ini menjembatani pembentukan dan pelaksanaan paradiplomasi Padang-Hildesheim selama 34 tahun ini. Selain peran kontak pribadi orang-orang di kedua kota ini, stimulus luar yang menyebabkan keberlangsungan paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini adalah adanya SDGs. Keempat, peran partai politik. Resolusi Perdana Menteri Presiden Jerman tahun 1988 memperjelas bahwa pelaksanaan langkah-langkah bantuan pembangunan di luar negeri merupakan urusan pemerintah federal, dan pemerintah negara bagian bertanggung jawab atas pemberian bantuan pembangunan dan bantuan di bidang pendidikan terhadap negara lain terutama negara-negara berkembang dan hal-hal tersebut harus dilakukan dalam koordinasi yang erat dengan pemerintah federal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran dari penulis untuk Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan paradiplomasi kedepannya yaitu Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat memaksimalkan paradiplomasi-paradiplomasi yang telah ada sesuai dengan pengimplementasian paradiplomasi berdasarkan kacamata hubungan internasional tanpa berfokus hanya pada kesamaan karakteristik dan potensi unggulan daerah.